

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Oktober 2018/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JOHANSYAH
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 488483

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/350 m2 di KOTA JAMBI ,  
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1740 m2/170 m2 di MERANGIN,  
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/27 m2 di MUARO JAMBI,  
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 183.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU E 700 RG-TX MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI  
Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
18.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 74.575.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.233.499**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.185.308.499**III. HUTANG** Rp. 422.888.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.762.420.499

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.